

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap pihak manajemen perusahaan sebagai pemakai internal perusahaan bertugas melaporkan posisi keuangan dari kegiatan operasinya dalam satu periode atau setiap tahun. Posisi keuangan tersebut berisi keadaan atau kondisi keuangan perusahaan serta hasil yang telah dicapai oleh perusahaan, dimana pihak pengguna laporan keuangan dapat melihat perkembangan perusahaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Posisi keuangan dan hasil kegiatannya tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan, sehingga terdapat hubungan antara pihak manajemen sebagai pemakai internal dengan pemakai eksternal antara lain pemerintah, kreditur dan investor atau calon kreditur, dan bank.

Informasi dalam laporan keuangan haruslah disajikan secara wajar, dapat dipercaya, dan tidak menyesatkan bagi pemakainya, sehingga kebutuhan masing- masing pihak yang berkepentingan dapat terpenuhi. Guna menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan dan untuk mengetahui kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Perlu adanya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh seseorang yang independen. Hal ini dimaksudkan agar hasil pemeriksaan tersebut merupakan hasil yang tidak memihak.

Auditing merupakan suatu proses pemeriksaan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi catatan pembukuan dan bukti – bukti pendukung yang dikumpulkan atas pernyataan mengenai aksi – aksi ekonomi dan kejadian – kejadian serta melihat bagaimana tingkat hubungan antara pernyataan dengan kenyataan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Auditor eksternal adalah audit terpisah dari perusahaan yang disewa oleh perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan yang disusun telah mengikuti prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku secara umum. Auditor eksternal yang memiliki kompetensi, independensi, dan berpedoman pada etika profesi akutan publik akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan.

Kredibilitas auditor tentu sangat tergantung dari kepercayaan publik yang telah menggunakan jasa mereka. Akuntan Publik mendapatkan kepercayaan dari perusahaan yang di auditnya atau klien yang membayar *fee*, maupun dari pihak ketiga yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut guna melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini (pendapat) apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik. Auditor yang dianggap telah melakukan kesalahan maka akan berakibat pada tereduksinya kepercayaan

klien karena klien merupakan pihak yang mempunyai pengaruh besar terhadap auditor.

Pada beberapa tahun terakhir profesi akuntan publik telah menjadi perhatian. Banyaknya kasus manipulasi laporan audit dan skandal keuangan yang melibatkan auditor serta Kantor Akuntan Publik (KAP) di dunia termasuk di Indonesia, telah menurunkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan seperti investor dan kreditor mempertanyakan keberadaan akuntan publik sebagai pihak yang independen. Kasus manipulasi dan skandal laporan keuangan dalam dunia bisnis yang terjadi beberapa tahun lalu dan berindikasi melibatkan pihak akuntan publik diantaranya adalah terungkapnya kasus Fraud akuntansi pada *British Telecommunication plc* di Italia tahun 2017.

WARTAEKONOMI.CO.ID - Awal triwulan kedua 2017 terjadi fraud akuntansi pada perusahaan British Telecommunication plc yang mengindikasikan kegagalan auditor dari Kantor Akuntan Publik yang termasuk The Bigfour yaitu Price Waterhouse Coopers (PWC) . Relasi PWC dengan British Telecommunication plc telah berlangsung selama 33 tahun. Namun Fraud berhasil terdeteksi oleh Pelapor Pengaduan (Whistleblower) yang dilanjutkan dengan akuntansi forensic oleh KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler). Praktik fraud terjadi sejak tahun 2013, namun auditor gagal mendeteksi inflasi (peningkatan) laba perusahaan selama beberapa tahun dengan cara tidak wajar melalui kerjasama koruptif dengan klien perusahaan dan jasa keuangan (Diaz,2017).

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa adanya masa ikatan KAP PWC dengan klien terlalu lama (*audit tenure*) , hingga muncul hubungan kedekatan antara auditor dengan klien dan memungkinkan terjadinya kerjasama yang menyebabkan auditor membuat opini yang tidak terjamin ketepatannya selama

proses pengauditan atau dapat dikatakan auditor menjadi tidak independen dalam menjalankan tugasnya.

LIPUTAN6.COM - Beberapa kasus serupa juga terjadi di Indonesia, diantaranya adalah kasus kegagalan audit laporan keuangan PT. Indosat Tbk pada tahun 2011. Bulan februari 2017 Publik Company Accounting Oversight Board (PCAOB) atau Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat menjatuhkan hukuman kepada KAP Ernst and Young (EY) Indonesia karena terbukti berperan dalam kegagalan audit laporan keuangan PT. Indosat Tbk tahun 2011. EY terbukti gagal menyajikan bukti yang mendukung perhitungan atas sewa 4000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan indosat, dan malah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan audit tersebut padahal perhitungan dan analisisnya belum selesai (Agustina,2017).

Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kegagalan tersebut bias terjadi karena auditor tidak menerapkan skeptisme professional yang memadai yang mengakibatkan auditor lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup sehingga kurang tepat dalam memberikan opini mengenai tingkat kewajaran laporan keuangan PT. Indosat. KAP Ernest and Young juga tidak cukup kompeten dalam mengaudit PT. Indosat Tbk dalam mendeteksi maupun mengungkap kecurangan laporan keuangan mereka.

TRIBUNNEWS.COM - Kasus suap yang dilakukan oleh Irjen Kementrian desa pembangunan daerah tertinggal kepada auditor BPK RI Ali sadli dan rochman saptogiri untuk mendapatkan Opini atas laporan keuangan sesuai yang diinginkannya (Herudin,2017).

Dengan adanya kasus diatas menggambarkan bahwa dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan dipengaruhi oleh adanya suap yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Tindakan aparat pemerintah dengan auditor BPK RI tentu melanggar prinsip independensi. Tidak etis seorang auditor melakukan

komunikasi dengan pihak yang di periksa dengan mendasarkan pada imbalan sejumlah uang demi mendapatkan opini atas laporan keuangan sesuai dengan keinginannya, hal ini dapat dikatakan tidak jujur dan tidak adil dalam menjalankan tugasnya.

TRIBUNNEWS.COM - Akuntan Indonesia terancam kalah bersaing dengan akuntan asal luar negeri di era globalisasi. Sebab kesadaran akuntan untuk memiliki sertifikat profesi atau sertifikat carter akuntan (CA) masih minim. Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jabar, Edi Jaenudin “Yang teregister di negara atau terdaftar di Kementerian Keuangan itu mencapai 55 ribu akuntan. Sedangkan yang memiliki sertifikat CA baru 22 ribu akuntan (Teuku,2016).

Dari kasus diatas menunjukkan bahwa masih sedikit jumlah akuntan yang tersertifikasi. Nyatanya pada pasar tenaga kerja, akuntan publik yang memiliki sertifikasi akan lebih dipercaya oleh sebuah perusahaan untuk melakukan audit keuangan karena dipercaya memiliki kompetensi unggul dibandingkan dengan akuntan yang belum memiliki sertifikasi.

PPPK.KEMENKEU.GO.ID - Menteri Keuangan menetapkan sanksi pembekuan atas izin usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) CHOIRUL ANWAR, S.E., AK., CPA karena belum sepenuhnya mematuhi standar Audit - SPAP dalam pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Kanaya. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Pasal 40 PMK Nomor 17 /PMK.OI/2008 tentang Jasa Akuntan Publik (2017).

Berdasarkan kasus diatas menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya Akuntan publik maupun Kantor akuntan publik tersebut melanggar kode etik yaitu melanggar prinsip standar teknis karena tidak bertanggung jawab untuk memenuhi standar teknis dan melanggar prinsip kepentingan publik karena terbukti tidak bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik terkait

dengan penyajian laporan audit sebagai informasi yang dibutuhkan untuk publik.

Berdasarkan dengan topik diatas ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan pemberian opini auditor yaitu *audit tenure*, skeptisme profesional, independensi auditor, kompetensi auditor, etika profesi. Kemudian dihubungkan dengan pentingnya peran profesi akuntan di sektor bisnis dan publik di Indonesia, akuntan seolah menjadi profesi yang harus/paling bertanggung jawab mengembangkan pengetahuan dan praktik akuntansi, manajemen bisnis, dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial dalam perspektif nasional dan internasional. Maka peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, yaitu “Pengaruh Independensi dan Kompetensi auditor terhadap Ketepatan Pemberian Opini Auditor” pada Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yang terjadi, yaitu:

1. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit?
2. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit?
3. Apakah Independensi, Kompetensi Auditor berpengaruh bersama – sama terhadap Ketepatan Pemberian Opini Auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah penulis jabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh faktor independensi terhadap ketepatan pemberian opini audit.
- b. Untuk mengetahui pengaruh faktor kompetensi terhadap ketepatan pemberian opini audit.
- c. Untuk mengetahui pengaruh faktor independensi, kompetensi terhadap ketepatan pemberian opini audit.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis terhadap berbagai pihak yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh independensi, dan kompetensi terhadap ketepatan pemberian opini audit.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual terkait ketepatan pemberian opini audit sebagai fokus utama bagi pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi KAP di Jakarta Barat dan Jakarta Timur dalam rangka meningkatkan

independensi, dan kompetensi sehingga auditor dapat memberikan opini audit yang lebih tepat.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan profesi auditor dalam menerapkan sikap independensi, dan kompetensi sehingga opini yang diberikan dalam proses mengaudit lebih andal.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada akuntan publik dalam melaksanakan audit.